

Partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan: studi kasus proyek pemberdayaan kecamatan terpadu TA. 2003-2004 di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Saragih, Nika Sarmuria, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=109886&lokasi=lokal>

Abstrak

Meningkatkan kemampuan diri atau kemandirian masyarakat (to give ability) dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan "partisipasi masyarakat", sehingga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik mental maupun emosional dalam setiap tahapan kegiatan P2KT untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan kebijakan serta turut bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tersebut serta memberilah kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.

Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamatan Siantar serta untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT tersebut.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Ketua Pelaksana Kabupaten, Kepala Bappeda, Camat Siantar, Pangulu, Tim Teknis Lapangan, Pimpro, Bendpro, Fasilitator Desa, Fasilitator Kecamatan serta Masyarakat yang semuanya berjumlah 20 informan. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KT di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun ini mengacu pada pendapat dari teori Sastropetro, Abe, Iff, Adi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terwujud dalam pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) di Kecamatan Siantar. Bentuk partisipasi masyarakat berupa uang, bahan bangunan, tenaga, sumbangan pikiran yaitu pendapat dan masukan serta upaya masyarakat dalam rapat untuk mempengaruhi keputusan yang diambil serta inisiatif membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) sebagai wadah proses pembelajaran bagi masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara prasarana yang telah dibangun. Dimana program P2KT berbeda dengan program-program sebelumnya.

Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) bersifat bottom up. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat/partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Telah terjadi transfer daya (transfer of power) kepada masyarakat baik berupa pengetahuan maupun keterampilan sehingga self-sustain capacity mulai meningkat. Sistem perencanaan yang bersifat bottom up juga telah diterapkan sehingga

masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang terbagi atas dua bagian yaitu penghambat dan pendorong. Faktor penghambat terdiri dari kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat tentang P2KT yang beragam, kurangnya rasa percaya diri, kesenjangan persepsi antara pelaku program. Sedangkan faktor pendukung yaitu pendidikan, pengalaman berorganisasi, dukungan tokoh masyarakat serta keciinya intervensi pemerintah.

Adapun saran yang dikemukakan dalam tesis ini yaitu bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun mengingat masih kurangnya keahlian dan keterampilan masyarakat, dimana pelaksanaan P2KT berkaitan dengan pembangunan prasarana seperti membangun sarana air bersih, pembatuan jalan dan sebagainya, yang membutuhkan keahlian khusus dari pelaku program untuk melaksanakannya, maka perlu diadakan upaya peningkatan SDM di masa yang akan datang. Langkah yang paling strategis dan praktis adalah dengan menekankan peningkatan tersebut melalui kegiatan pelatihan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan P2KT, yakni dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pelatihan teknis di kabupaten ataupun melalui pembuatan petunjuk teknis yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan P2KT, bukan hanya perwakilan saja. Kemudian dalam hal tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, hal ini tidak lepas dengan pelaksanaan sosialisasi, maka untuk ke depannya perlu ditingkatkan dengan cara, sosialisasi dilakukan terus menerus dalam lapangan kegiatan. Bagi masyarakat memang partisipasi masyarakat sudah besar dalam pelaksanaan P2KT, namun masih ada masyarakat yang tidak terlihat sama sekali, maka perlu dilakukan pendekatan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak teriibat melalui ajakan kepada tetangga ataupun kerabat keluarga tersebut untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang P2KT.

Sementara dalam hal pengembangan KPP sebaiknya teknik pendampingan terhadap masyarakat tetap dilakukan walaupun kegiatan sudah selesai serta mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa prasarana yang sudah ada merupakan tanggung jawab masyarakat untuk merawat dan memeliharanya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Khusus prasarana yang dipemntukkan bagi kepentingan umum agar pelesiariannya diprogramkan oleh pemerintah nagori melalui APB Desa dengan dukungan Kabupaten Upaya pengembangan tersebut hendaknya terlihat dalam kebliakan daerah daiam bentuk pmgram kabupaten setiap tahun, yang didukung oleh pemerintah propinsi dan fasllitasi pemerintah baik berupa dana dan pendukung lainnya.